



# FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN

## PEMERINTAHAN DESA

AKHIR TAHUN ANGGARAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
KECAMATAN .....

DESA .....

**TAHUN**  
**20..**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kotawaringin Timur.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 20..., ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa ..... khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 20..., baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa ..... sebagai desa yang berkarakter, maju dan berkah. Dan menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Kotawaringin Timur.

..nama desa, ..... - ..... - 20...  
Kepala Desa .....

*Nama, Tanda Tangan & Cap*

.....

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b>	<b>00</b>
<b>PENGANTAR</b> .....	<b>00</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>00</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Tujuan Penyusunan Laporan	00
1.2. Visi Misi	00
1.3. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan	00
<b>BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	00
2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	00
2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	00
2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	00
2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	00
2.6. Keberhasilan Yang Dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi, Dan Upaya Yang Ditempuh	00
<b>BAB III PENUTUP</b>	
3.1. Kesimpulan	00
3.2. Ucapan Terima Kasih	00
3.3. Saran	00
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. <i>Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... (Format A.1)</i>	

2. *Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... (Format A.2)*
3. *Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... (Form B)*
4. *Format Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)*
5. *Format Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)*
6. *Format Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)*
7. *Format Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format D)*
8. *Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 20...*



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**  
**L P P D**  
**AKHIR TAHUN ANGGARAN 20...**  
**DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Desa untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- u. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- v. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- w. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- x. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- y. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- z. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- aa. Peraturan Desa Nomor ..... Tahun ..... Tentang Pendapatan Desa;
- bb. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
- cc. *Peraturan Desa (Lainnya...);*
- dd. *dst... (yang relevan dan berlaku...).*

**1.2. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**a. Visi Desa**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**b. Misi Desa**

Dalam mewujudkan misi Desa.... Kecamatan ..... Kabupaten Kotawaringin Timur maka disusunnya misi Desa sebagai berikut:

- 1. *Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik;*
- 2. *Menjadikan masyarakat Desa ..... Yang Religius;*
- 3. *Menjadikan Desa ..... yang aman dan tentram;*
- 4. *Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan;*
- 5. *Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan;*
- 6. *Merubah pola pikir masyarakat dari individualistis kearah gotong royong.*

**1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

- 1. *Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;*
- 2. *Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;*

3. *Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;*
4. *Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan berkah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;*
5. ....

**b. Arah Kebijakan Keuangan Desa**

1. *Belanja Kepala desa dan perangkat desa;*
2. *Intensif RT dan RW;*
3. *Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;*
4. *Tunjangan operasional BPD;*
5. *Program operasional Pemerintahan Desa;*
6. *Program Pelayanan Dasar;*
7. *Program pelayanan dasar pendidikan;*
8. *Program pelayanan dasar infrastruktur;*
9. *Program kebutuhan primer pangan;*
10. *Program kebutuhan primer papan;*
11. *Program kebutuhan primer Sandang;*
12. *Program pelayanan kesehatan;*
13. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
14. *Program Ekonomi produktif;*
15. *Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;*
16. *Program Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19;*
17. *Program Penanggulangan Keadaan Darurat;*
18. *Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;*
19. *Penambahan Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;*
20. *Penambahan Kedua Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;*

**c. Kebijakan Umum Anggaran**

Secara Umum anggaran Desa ..... diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa ..... dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa ..... berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat

meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini *adalah*:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

**BAB II**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**2.1. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

- A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*
1. *Siltap aparatur pemdes dan Kepala Desa.*
  2. *Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa.*
  3. *Jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa.*
  4. *Oprasional pemerintah desa.*
  5. *Honor dan Tunjangan BPD*
  6. *Oprasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).*
  7. *Penedia Insentif/Oprasional RT/RW*
  8. *Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan*
  9. *Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.*
  10. *Musyawah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa non reguler)*
  11. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desaa/RKP Desa dll)*
  12. *Dukungan dan Pelaksanaan Pilkades, Ka Kewilayahan dan BPD*
  13. *Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa Yang Purna Tugas*
  14. *Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)*
- B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*
1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
    - a) *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.*
    - b) *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.*
    - c) *Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.*
    - d) *.....*
  2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
    - a) *Penyediaan Tunjangan BPD.*
    - b) *Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.*
    - c) *.....*
  3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
    - a) *Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan*
    - b) *.....*
    - c) *.....*
  4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    - a) *Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)*
    - b) *.....*
  5. Pertanahan
    - a) *Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)*

- b) *Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*
- c) .....

**2.2. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. Pelayanan Dasar
  - a) *Honor pendamping kesehatan.*
  - b) *Honor tenaga pendamping KB*
  - c) *Honor FKD*
  - d) *BOP Posyandu*
  - e) *Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita*
  - f) *PMT ibu hamil*
  - g) *PMT Balita dan Lansia*
  - h) .....
  - i) .....
  - j) .....
2. Sarana Prasarana
  - a) *BOP Tim Pengelola Desa*
  - b) *Pembangunan Drainase Tepi Jalan Dusun II Rw 03 Rt 07*
  - c) *Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah*
  - d) *Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baleho dll)*
  - e) .....
  - f) .....
  - g) .....

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. Pendidikan
  - a) *Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)*
  - b) *Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi*
  - c) .....
2. Kesehatan
  - a) *Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)*
  - b) *Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan*
  - c) .....
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a) *Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang*
  - b) *Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa\*\*)*
  - c) .....
4. Kawasan Permukiman
  - a) *Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)*
  - b) .....
  - c) .....

5. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
  - a) *Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Poster, Baleho dll)*
  - b) .....
  - c) .....

### 2.3. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. *Bantuan oprasional TP-PKK.*
2. *Bantuan oprasional KPM.*
3. *Biaya oprasional LPM.*
4. ....

B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. Kelembagaan Masyarakat
  - a) *Pembinaan LKMD/LPM/LPMD*
  - b) *Pembinaan PKK*
  - c) .....

### 2.4. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. *Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM).*
2. *Peningkatan kualitas pemerintah desa.*
3. *Bantuan sosial.*
4. *Pembinaan kader pembangunan desa dan pemberdayaan desa.*
5. *Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM*
6. ....

B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. Pertanian dan Peternakan
  - a) *Pembangunan Saluran irigasi tersier/ sederhana*
  - b) .....

### 2.5. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang *(Perubahan)* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20..., dengan rincian *terlampir pada format A.1*

#### A. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	Rp.	0.000.000.000,-
- Pendapatan Transfer	Rp.	0.000.000.000,-
- Dana Desa	Rp.	0.000.000.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	0.000.000.000,-
- Alokasi Dana Desa	Rp.	0.000.000.000,-

- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	0.000.000.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	0.000.000.000,-
- Pendapatan Lain-lain	Rp.	0.000.000.000,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>Rp. 0.000.000.000,-</b>
<b>B. BELANJA</b>		
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	0.000.000.000,-
Desa	Rp.	0.000.000.000,-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	0.000.000.000,-
Desa	Rp.	0.000.000.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0.000.000.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa		
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>Rp. 0.000.000.000,-</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>Rp. 0.000.000.000,-</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>		
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0.000.000.000,-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>Rp. 0.000.000.000,-</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>Rp. 0.000.000.000,-</b>

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...

Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..., dengan rincian terlampir pada format B

## 2.6. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat diurai dalam tabel *dibawah ini*:

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1.	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	a) Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa. b) Peningkatan Operasional Pemerintah Desa. c) ..... d) ..... e) dst	a) Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa. b) ..... c) ..... d) dst	a) Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa. b) ..... c) dst

2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tersedianya jembatan penghubung jalan.</li> <li>b) Terbangunya Rumah Sehat dan Layak Huni.</li> <li>c) .....</li> <li>d) dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kondisi jembatan penghubung tidak memadai.</li> <li>b) Kurangnya swadaya masyarakat dalam perbaikan rumah.</li> <li>c) .....</li> <li>d) dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan.</li> <li>b) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.</li> <li>c) .....</li> <li>d) .....</li> <li>e) dst</li> </ul>
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan Insentif/Honor Lembaga Desa.</li> <li>b) .....</li> <li>c) .....</li> <li>d) .....</li> <li>e) dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kurangnya pos anggaran untuk Lembaga Desa.</li> <li>b) .....</li> <li>c) .....</li> <li>d) .....</li> <li>e) dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemberian Insentif/Honor Lembaga tepat waktu.</li> <li>b) .....</li> <li>c) .....</li> <li>d) dst</li> </ul>
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan hasil pertanian masyarakat.</li> <li>b) .....</li> <li>c) dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kurangnya perawatan dan pemeliharaan saluran Irigasi.</li> <li>b) .....</li> <li>c) dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian.</li> <li>b) .....</li> <li>c) dst</li> </ul>
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa.</li> <li>b) Kegiatan Mendesak Desa.</li> <li>c) .....</li> <li>d) .....</li> <li>e) dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 20...</li> <li>b) Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 20...</li> <li>c) .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan Pos Anggaran Penanggulangan Bencana</li> <li>b) Penyaluran BLT DD ... KPM</li> <li>c) .....</li> <li>d) dst</li> </ul>

**BAB III**  
**PENUTUP**

**2.7. KESIMPULAN**

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

- a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa .....
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa ..... tahun anggaran 20... berdasarkan APB Desa
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa .....

**2.8. SARAN**

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 20... ini dibuat sebagai bahan seperlunya. Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ..... Akhir Tahun Anggaran 20.... Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa .....

..nama desa, ..... - ..... – 20...  
Kepala Desa .....

*Nama, Tanda Tangan & Cap*

.....

**A.1. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 20...**

<b>I. PENDAPATAN</b>		
	- Pendapatan Asli Desa	00.000.000,00
	- Pendapatan Transfer	00.000.000,00
	a. Dana Desa	0.000.000.000,00
	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	00.000.000,00
	c. Alokasi Dana Desa	00.000.000,00
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	00.000.000,00
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	00.000.000,00
	- Pendapatan Lain-lain	00.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0.000.000.000,00</b>
<b>II. BELANJA</b>		
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	000.000.000,00
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	000.000.000,00
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	00.000.000,00
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	00.000.000,00
	- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	000.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>0.000.000.000,00</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT (I - II)</b>	<b>-0.000.000.000,00</b>
<b>III. PEMBIAYAAN</b>		
	- Penerimaan Pembiayaan	00.000.000,00
	- Pengeluaran Pembiayaan	00.000.000,00
	<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>

....nama Desa..., 31 Desember  
20...  
Kepala Desa

Nama, Tanda Tangan & Cap  
.....

**A.2. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20...**

KODE REK		URAIAN	BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBER DANA
1	2	3	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>		
	1.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>00.000,00</b>	
	1.1.1	Hasil Usaha	00.000,00	
	1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan gotong royong	00.000,00	
	1.1.3	Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah	00,000,00	
	1.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>00.000,00</b>	
	1.2.1	Dana Desa	00.000,00	
	1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	00.000,00	
	1.2.3	Alokasi Dana Desa	00.000,00	
	1.2.4	Bantuan keuangan	00,000,00	
	1.2.4.1	Bantuan Keuangan Provinsi	00.000,00	
	1.2.4.2	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	00.000,00	
	1.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>00.000,00</b>	
	1.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	00.000,00	
	1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	00.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>00.000,00</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>		
1.	2.1	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>00.000,00</b>	
1..	2.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan		
	2.1.1.1	Belanja Pegawai:		
		- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat		
		- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
		- Tunjangan BPD		
		- .....		
	2.1.2	Operasional perkantoran		
	2.1.2.2	Belanja barang dan jasa		
		- Alat tulis kantor		
		- Benda Pos		
		- Pakaian Dinas dan Atribut		
		- Pakaian Dinas		
		- Alat dan Bahan Kebersihan		
		- Perjalanan Dinas		
		- Pemeliharaan		

KODE REK		URAIAN	BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBER DANA
1	2	3	6	7
		- Air, listrik, dan Telepon		
		- Honor		
		- Dst.....		
	2.1.2.3	Belanja Modal		
		- Komputer		
		- Meja dan Kursi		
		- Mesin TIK		
		- Dst.....		
	2.1.3	Operasional BPD		
	2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa		
		- ATK		
		- Penggandaan		
		- Konsumsi Rapat		
		- Dst.....		
	2.1.4	Operasional RT/RW		
	2.1.4.2	- ATK		
		- Penggandaan		
		- Konsumsi Rapat		
		- Dst.....		
<b>2</b>	<b>2.2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
	2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi		
	2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
		- Upah Kerja		
		- Honor		
		- Dst.....		
	2.2.1.3	Belanja Modal		
		- Semen		
		- Material		
		- Dst.....		
	2.2.2	Pengaspalan jalan Desa		
	2.2.2.2	Belanja barang dan jasa		
		- Upah Kerja		
		- Dst.....		
	2.2.2.3	Belanja Modal		

KODE REK		URAIAN	BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBER DANA
1	2	3	6	7
		= Semen	0.000.000.000,00	
		- Material		
		- Dst.....		
	2.2.3	Kegiatan .....		
<b>3.</b>	2.3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		
3....	2.3.1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
	2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
		- Honor Pelatih		
		- Konsumsi		
		- Bahan Pelatihan		
		- Dst.....		
	2.3.2	Kegiatan .....		
<b>4.</b>	<b>2.4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	0.000.000.000,00	
4....	2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
	2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
		Honor Pelatih		
		Konsumsi		
		Bahan Pelatihan		
		Dst.....		
<b>5.</b>	2.4.2	Kegiatan .....	0.000.000.000,00	
	2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
		Belanja Barang dan Jasa		
		- Honor Tim		
		- Konsumsi		
		- Obat-obatan		
		- Dst.....		
	2.5.2	Kegiatan .....		
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	0.000.000.000,00	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	0.000.000.000,00	
<b>3</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>3.1</b>		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	00.000,00	
	3.1.1	SILPA	00.000,00	
	3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
	3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		

KODE REK		URAIAN	BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBER DANA
1	2	3	6	7
		<b>JUMLAH (RP)</b>	<b>0,000,000,00</b>	
	<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
	3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
	3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
		<b>JUMLAH (RP)</b>	<b>0,000,000,00</b>	

.nama Desa....., .....20...  
Kepala Desa

*Nama, Tanda Tangan & Cap*  
.....

**B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20...**

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>JUMLAH REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/KURANG (Rp.)</b>	<b>KET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>				
1.1.1	Hasil Usaha				
1.1.2	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong				
1.1.3.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>				
1.2.1.	Dana Desa				
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.3.	Alokasi Dana Desa				
1.2.4	Bantuan Keuangan				
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Provinsi				
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				
<b>1.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>				
1.3.1.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>				
2.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan				
2.1.1.1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
	- .....				
2.1.2	Operasional perkantoran				
2.1.2.2	Belanja barang dan jasa				
	- Alat tulis kantor				
	- Benda Pos				
	- Pakaian Dinas dan Atribut				

KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	
	- Pakaian Dinas				
	- Alat dan Bahan Kebersihan				
	- Perjalanan Dinas				
	- Pemeliharaan				
	- Air, listrik, dan Telepon				
	- Honor				
	- Dst.....				
2.1.2.3	Belanja Modal				
	- Komputer				
	- Meja dan Kursi				
	- Mesin TIK				
	- Dst.....				
2.1.3	Operasional BPD				
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- ATK				
	- Penggandaan				
	- Konsumsi Rapat				
	- Dst.....				
2.1.4	Operasional RT/RW				
2.1.4.2	- ATK				
	- Penggandaan				
	- Konsumsi Rapat				
	- Dst.....				
<b>2.2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi				
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Kerja				
	- Honor				
	- Dst.....				
2.2.1.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Material				
	- Dst.....				
2.2.2	Pengaspalan jalan Desa				
2.2.2.2	Belanja barang dan jasa				

KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	
	- Upah Kerja				
	- Dst.....				
2.2.2.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Material				
	- Dst.....				
2.2.3	Kegiatan .....				
<b>2.3</b>	<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>				
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor Pelatih				
	- Konsumsi				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst.....				
2.3.2	Kegiatan .....				
<b>2.4</b>	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>				
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor Pelatih				
	- Konsumsi				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst.....				
2.4.2	Kegiatan .....				
<b>2.5</b>	<b><u>BIDANG TAK TERDUGA</u></b>				
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor Tim				
	- Konsumsi				
	- Obat-obatan				
	- Dst.....				
2.5.2	Kegiatan .....				
	<b>JUMLAH BELANJA</b>				
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>JUMLAH REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/KURANG (Rp.)</b>	<b>KET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
3.1.1	SILPA				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
	<b>JUMLAH (RP)</b>				
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
	<b>JUMLAH (RP)</b>				

**C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**  
**C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	00 00 00 00
2.	Kependudukan.	<b>a. Jumlah Penduduk:</b> 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa <b>b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:</b> 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus <b>c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:</b> 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	00 Org 00 Org 00 Org 00 Org 00 Org  00 Org 00 Org 00 Org  00 Org 00 Org 00 Org
3.	Pertanahan	<b>a. Status Tanah:</b> 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai <b>b. Luas Tanah:</b> 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa <b>c. Peruntukan:</b> 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum <b>d. Tanah yang Belum Dikelola</b> 1) Hutan 2) Rawa-rawa	00 SHM 00 HGU 000 HP  00 Ha 00 Ha 00 Ha  00 Ha 00 Ha 00 Ha 00 Ha 00 Ha  00 Ha 00 Ha
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1. PNS 2. Non PNS b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrengbangdes e. Musyawarah BPD	00 Org 00 Org 00 Org 00 Org 00 Org 00 Org
5.	Ketentraman dan Ketertiban	<b>a. Pembinaan Hansip</b> 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih <b>b. Ketentraman dan Ketertiban:</b> 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	00 Org 00 Org 00 Org  00 Kasus 00 kali 00 kali 00 Unit 00 Kasus
6.	Pembinaan	<b>a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:</b>	

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	2	3	4
	lembagaan Kemasyarakatan	1) Rt/Rw 2) PKK 3) Karang Taruna 4) Pos Pelayanan Terpadu 5) LPM b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa -ya/tidak d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah -ya/tidak e. Lembaga Adat – ada/tidak f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan -ya/tidak	Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del>

### **C.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa b. Jalan Kabupaten/Kota c. Jalan Provinsi d. Jalan Negara e. Jembatan f. Kantor Kepala Desa	00 Km 00 Km 00 Km 00 Km 00 Unit Ada/ <del>Tidak</del>
2.	Pembangunan Pendidikan	<b>a. Tempat Pendidikan Umum</b> 1) Kelompok Bermain 2) Taman Kanak-Kanak 3) Sekolah Dasar 4) Sekolah Menengah 5) Akademi 6) Institut/Sekolah Tinggi <b>b. Tempat Pendidikan Khusus</b> 1) Pendidikan Pesantren 2) Madrasah 3) Sekolah Luar Biasa 4) Balai Latihan Kerja 5) Kursus-Kursus	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Umum Swasta c. Rumah Sakit Kusta d. Rumah sakit Mata e. Rumah Sakit Jiwa f. Rumah Sakit Bersalin g. Rumah Bidan h. Puskesmas i. Apotik	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	<b>a. Sarana Olahraga:</b> 1) Lapangan Umum 2) Lapangan Khusus	00 Unit 00 Unit

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	2	3	4
		<b>b. Sarana Kesenian/Kebudayaan:</b> 1) Gelanggang Remaja (Jumlah) 2) Gedung Kesenian (Jumlah) 3) Gedung Teater (Jumlah) 4) Gedung Bioskop (Jumlah)	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit
		<b>c. Sarana Sosial</b> 1) Panti Asuhan 2) Panti Pijat Tunanetra 3) Wordo 4) Panti Jompo	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit
		<b>d. Sarana komunikasi</b> 1) Radio Komunikasi (Jumlah) 2) Papan Pengumuman (Jumlah)	00 Unit 00 Unit
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan b. Industri Besar c. Industri Sedang d. Industri Rumah Tangga e. Tempat Rekreasi f. Hotel g. Restoran/Rumah Makan h. Saluran Irigasi	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit

### **C.3. Bidang Kemasyarakatan**

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	<b>a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:</b> 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 3) Peraturan Menteri mengenai Desa <b>b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah</b> 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa 2) Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Desa <b>c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa</b> 1) Sosialisasi Peraturan Desa 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa	00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa c. Masyarakat memperoleh informasi	00 Kali Ada/ <del>Tidak</del> Ada/ <del>Tidak</del>

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	2	3	4
		dan pelayanan yang adil d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa	Ada/ <del>Tidak</del>  Ada/ <del>Tidak</del>
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	00 Kali  00 Kali  00 Kali  00 Kali  00 Kali
4.	Keagamaan	a. Majelis Taklim b. Majelis gereja c. Majelis Budha d. Majelis Hindu e. Remaja Masjid f. Remaja Gereja g. Remaja Budha h. Remaja Hindu	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga b. Penampung Pekerja ke luar negeri	00 Unit 00 Unit

#### D. Format Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya /Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang lingkungan hidup	00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna	00 Kali 00 Kali 00 Kali 00 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan	00 Kali 00 Kali

....nama Desa...., 31 Desember 20...  
Kepala Desa

Nama, Tanda Tangan & Cap

.....

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK  
TAHUN 20...**

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI : .....

No.	URAIAN	JUMLAH	
1.	<b>PENDUDUK AWAL</b>		
	a. Laki-laki	0.000	Orang
	b. Perempuan	0.000	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>00.000</i>	<i>Orang</i>
2.	<b>LAHIR</b>		
	a. Laki-laki	0.000	Orang
	b. Perempuan	0.000	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>00.000</i>	<i>Orang</i>
3.	<b>MATI</b>		
	c. Laki-laki	0.000	Orang
	d. Perempuan	0.000	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>00.000</i>	<i>Orang</i>
4.	<b>DATANG</b>		
	e. Laki-laki	0.000	Orang
	f. Perempuan	0.000	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>00.000</i>	<i>Orang</i>
5.	<b>PINDAH</b>		
	g. Laki-laki	0.000	Orang
	h. Perempuan	0.000	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>00.000</i>	<i>Orang</i>
6.	<b>PENDUDUK AKHIR</b>		
	i. Laki-laki	0.000	Orang
	j. Perempuan	0.000	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	<i>00.000</i>	<i>Orang</i>

NO.	MUTASI ANTAR	PINDAH			DATANG		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1.	DESA	00	00	00	00	00	00
2.	KECAMATAN	00	00	00	00	00	00
3.	KABUPATEN	00	00	00	00	00	00
4.	PROVINSI	00	00	00	00	00	00
5.	NEGARA	00	00	00	00	00	00
	<b>JUMLAH</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

....nama Desa...., 31 Desember 20...  
Kepala Desa

Nama, Tanda Tangan & Cap

.....

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK  
TAHUN 20...**

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

No.	URAIAN	JUMLAH			
1.	<b>BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN</b>				
	<b>A. WNI</b>	0.000	Orang		
	- Laki-laki	0.000	Orang		
	- Perempuan				
	<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>
	<b>B. WNA</b>	0.000	Orang		
	- Laki-laki	0.000	Orang		
	- Perempuan				
	<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>
	<b>C. WNI + WNA</b>	0.000	Orang		
- Laki-laki	0.000	Orang			
- Perempuan					
<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>	
2.	<b>BERDASARKAN AGAMA</b>				
	<b>A. Islam</b>	0.000	Orang		
	- Laki-laki	0.000	Orang		
	- Perempuan				
	<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>
	<b>B. Kristen</b>	0.000	Orang		
	- Laki-laki	0.000	Orang		
	- Perempuan				
	<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>
	<b>C. Katholik</b>	0.000	Orang		
- Laki-laki	0.000	Orang			
- Perempuan					
<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>	
<b>D. Hindu</b>	0.000	Orang			
- Laki-laki	0.000	Orang			
- Perempuan					
<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>	
<b>E. Budha</b>	0.000	Orang			
- Laki-laki	0.000	Orang			
- Perempuan					
<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>	
<b>F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama</b>	0.000	Orang			
- Laki-laki	0.000	Orang			
- Perempuan					
<b>Jumlah (A+B + C+ D+E+F)</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>	
3.	<b>TOTAL PENDUDUK</b>				
	- Laki-laki	0.000	Orang		
	- Perempuan	0.000	Orang		
<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>	

....nama Desa..., 31 Desember 20...  
Kepala Desa

Nama, Tanda Tangan & Cap

.....